

ABSTRAK

Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Masyarakat dari *Fintech Attack* dalam Hukum Positif perspektif Maqashid Syariah” oleh Maya Asri Adistalaili dengan NIM 1880502230004, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang dibimbing oleh Dr. Nur Aziz Muslim, M.H.I dan Prof. Dr. Kutbuddin Aibak, M.H.I

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Masyarakat, *Fintech Attack*, Hukum Positif, Maqashid Syariah

Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh kasus kejahatan ITE dalam layanan perbankan yang dikenal dengan istilah *fintech attack* dengan jenis serangan *cybercrime* yang menimbulkan kerugian bagi konsumen *fintech*, jenis kerugian yang dialami konsumen berupa kerugian finansial maupun material. Modus kejahatan ini dilakukan dengan penyebaran link palsu, tautan dengan tujuan pembobolan sistem keamanan dan pembobolan rekening, dimana hal ini memanfaatkan data konsumen yang berhasil diretas yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Pemerintah ikut adil dalam menghadapi persoalan ini dengan menerbitkan peraturan-peraturan baru guna menghadapi tantangan teknologi digitalisasi.

Fokus penelitian antara lain: Bagaimana perlindungan hukum konsumen dan masyarakat terhadap *fintech attack* dalam hukum positif? Bagaimana perspektif maqashid syariah perlindungan hukum konsumen dan masyarakat terhadap *fintech attack* dalam hukum positif? Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya perlindungan hukum konsumen dan masyarakat yang termaktub dalam hukum positif mengenai persoalan ini yang kemudian daripada upaya perlindungan hukum konsumen dan masyarakat dalam hukum positif dianalisis pula dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

Jenis penelitian ini adalah adalah yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni Penelitian Inventarisasi hukum positif dan *statue approach*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *literature (library research)* dengan memusatkan pada hukum positif terkait perlindungan hukum dan digitalisasi.

Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) Perlindungan hukum terhadap konsumen dan masyarakat dari *fintech attack* dalam hukum positif diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa konsumen *fintech* yang menjadi korban serangan *ransomware* berhak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku usaha, pengaturan tentang ancaman hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan data pribadi konsumen *fintech* yang berakibat *fintech attack* diatur dalam UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yakni penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan pengaturan tentang ancaman hukuman bagi pelaku *fintech attack* yang dilakukan pada konsumen maupun masyarakat diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni dipenjara 6 tahun dan denda maksimal senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (2) Perlindungan hukum konsumen dan masyarakat terhadap *fintech attack* sebagaimana yang termaktub dalam hukum positif perspektif maqashid syariah Jasser Auda telah memenuhi tingkatan prinsip daruriyat, diantaranya ialah *hifdzu al-nafs/al-irdi* (Perlindungan HAM dan martabat manusia) dalam hukum konsumen tercantum mengenai hak-hak konsumen, *hifdzu al-aql* (Pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah) terkait prinsip edukasi terhadap

konsumen, aksi edukatif mengenai peran PUJK dalam memberikan pemahaman terhadap karakteristik produk atau layanan sektor keuangan kepada masyarakat luas serta mengedepankan pemahaman konsumen mengenai produk atau layanan, manfaat, biaya dan risiko serta prosedur dan mekanisme perlindungan konsumen, *hifdzu al-maal* (Pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan) bahwa perkembangan *fintech* yang merupakan pengembangan ekonomi sebagaimana diketahui bahwa *fintech* membawa perkembangan bagi lembaga keuangan yang mampu meningkatkan perekonomian nasional, serta pembangunan sumber daya manusia menjadi maqashid, hadirnya ruang uji coba (*Sandbox*) merupakan pembangunan terhadap SDM serta *hifdzul ma'lumat* dalam menjaga data pribadi perspektif maqashid syariah transformatif. Namun analisis maqashid syariah terhadap keefektifan hukum perlindungan konsumen *fintech* daripada *fintech attack* belum sepenuhnya terealisasi pada prinsip *hifdzu al-nafs/al-irdi*, *hifdzu al-aql*, *hifdzul al-maal* dalam pandangan maqashid syariah.

ABSTRACT

Thesis with the title "Legal Protection of Consumers and the Society Against from Fintech Attack in Positive Law from the perspective of Maqashid Sharia" by Maya Asri Adistalaili, Student Identification Number 1880502230004, Master's Program in Sharia Economic Law, Graduate School of UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, supervised by Dr. Nur Aziz Muslim, M.H.I., and Prof. Dr. Kutbuddin Aibak, M.H.I.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, the Society Against, Fintech Attack, Positif Law, Maqashid Sharia*

This thesis research is motivated by cases of cybercrime in banking services, commonly referred to as fintech attacks, which involve various forms of cyber threats resulting in losses for fintech consumers. The types of losses experienced by consumers include both financial and material damages. The crime is typically perpetrated through the distribution of fake links or malicious URLs, which aim to breach security systems and gain unauthorized access to bank accounts. These actions exploit consumer data that has been successfully hacked and subsequently used for personal gain. The government has taken part in addressing this issue by issuing new regulations to confront the challenges posed by digital technology and digitalization.

The focus of this research includes: (1) How is legal protection consumers and the society against fintech attack in positif law? (2) How is the perspective of Maqashid Sharia on the legal protection of consumers and society against fintech attack in positif law? This study aims to analyze the legal protection consumers and society against efforts stipulated in positif law regarding this issue, which are then further examined through the framework of Maqashid Sharia as proposed by Jasser Auda.

This research is classified as normative juridical research, using two approaches: the inventory of positif law and the statute approach. The data collection technique used in this study is the library research method, focusing on positif law related to legal protection and digitalization.

Based on the results of this study, the author concludes that: (1) Legal protection of consumers and the society against from fintech attacks in positive law is regulated in law number 8 of 1999 concerning consumer protection which regulates that fintech consumers who are victims of ransomware attacks are entitled to compensation from business actors, the regulation of the threat of punishment for business actors who utilize personal data of fintech consumers which results in fintech attacks is regulated in law number 27 of 2022 concerning the protection of personal data, namely a maximum imprisonment of 6 years and a maximum fine of Rp. 6.000.000.000,00 (six billion rupiah) and the regulation of the threat of punishment for the perpetrators of fintech attack carried out on consumers and the society against is regulated in law number 1 of 2024 concerning information and electronic transactions, namely a maximum imprisonment of 6 years and a maximum fine of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah). (2) legal protection consumers and society against as stipulated in positif law, when analyzed from the perspective of Maqashid Sharia according to Jasser Auda, has fulfilled the essential (daruriyat) principles, including hifz al-nafs/al-'ird (protection of human rights and human dignity), which are reflected in consumer law through the recognition and enforcement of consumer rights. Hifz al-'aql (the preservation of intellect, including the development of critical thinking and scientific research) is reflected in the principle of

consumer education. This includes educational initiatives by financial service providers (PUJK) to enhance public understanding of the characteristics of financial products or services. It emphasizes the importance of equipping consumers with knowledge regarding the benefits, costs, risks, procedures, and mechanisms of consumer protection. Hifz al-maal (the preservation of wealth, including economic development and equitable welfare distribution) is reflected in the development of fintech as an economic advancement. Fintech has contributed to the growth of financial institutions, enhanced national economic performance, and supported human resource development, aligning with the objectives of Maqashid Sharia. The establishment of a testing environment (sandbox) also represents a form of human capital development and Hifdzul ma'lumat (preservation of information) in safeguarding personal data from the perspective of transformative maqashid al-sharia. However, the Maqashid Sharia analysis regarding the effectiveness of consumer protection laws in the context of fintech, particularly in response to fintech attacks, has not been fully realized in the implementation of the principles of hifz al-nafs/al-'ird (protection of life and human dignity), hifz al-'aql (preservation of intellect), and hifz al-maal (preservation of wealth) from the perspective of Maqashid Sharia.

الملخص

أطروحة بعنوان “ حماية القانون للمستهلكين و المجتمع ضد هجمات التكنولوجيا المالية في القانون الإيجابي من منظور مقاصد الشريعة ” من تأليف مايا أسري أديستالي . رقم التسجيل: 1880502230004، الدراسات العليا ، الجامعة الإسلامية الحكومية سيد علي رحمة الله تولونج اجونج، التي تسترشد ، الدكتور نور عزيز مسلم، ماجستير في العلوم الإسلامية. و لأستاذ الدكتور قطب الدين أبيك، ماجستير في العلوم الإسلامية.

الكلمات المفتاحية : حماية القانون، المستهلكين و المجتمع ضد هجمات التكنولوجيا المالية في القانون الإيجابي، مقاصد الشريعة.

تستند هذه الأطروحة إلى خلفية تتعلق بجرائم المعلوماتية في خدمات البنوك، والمعروفة باسم هجمات التكنولوجيا المالية، والتي تمثل نوعاً من الجرائم الإلكترونية التي تسبب خسائر للمستهلكين في مجال التكنولوجيا المالية، أنواع الخسائر التي يتكبدها المستهلك تشمل الخسائر المالية والمادية. نَقْد هذا النوع من الجرائم من خلال نشر روابط مزيفة تحدف إلى اختراق نظام الأمان وسرقة الحسابات المصرفية، حيث يتم استغلال بيانات المستهلكين التي تم اختراقها لأغراض شخصية. تشارك الحكومة بإنصاف في مواجهة هذه المشكلة من خلال إصدار لوائح جديدة لمواجهة تحديات التكنولوجيا الرقمية.

محاور البحث: 1) كيف يتم حماية القانون للمستهلكين و المجتمع ضد هجمات التكنولوجيا المالية في القانون الإيجابي ؟ 2) كيف تكون جهة نظر مقاصد الشريعة في حماية القانون للمستهلكين و المجتمع ضد هجمات التكنولوجيا المالية في القانون الإيجابي ؟. تحدف هذه الدراسة إلى تحليل جهود القانون للمستهلكين و المجتمع عليها في القانون الإيجابي فيما يتعلق بهذه المسألة، ومن ثم تحليل هذه الجهود من منظور مقاصد الشريعة وفقاً لفكر جاسر عودة.

نوع هذا البحث هو البحث القانوني الإيجابي ، ويستخدم فيه منهجان: الأول هو أبحاث جرد القانن الإيجابي والثاني هو منهج النصوص القانونية. تتمثل تقنية جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة في منهج البحث المكتبي (البحث المكتبي)، مع التركيز على القانون الإيجابي المتعلق بحماية المستهلك والرقمنة .

نتيجةً لهذه الدراسة، خلصت الباحثة إلى أن : 1 يتم تنظيم الحماية القانونية للمستهلكين والجمهور من هجمات التكنولوجيا المالية في القانون الوضعي في القانون رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك الذي ينص على أن مستهلكي التكنولوجيا المالية الذين يقعون ضحايا لهجمات القدية يحق لهم الحصول على تعويض من الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية، كما يتم تنظيم التهديد بعقوبة الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية التي تستخدم البيانات الشخصية لمستهلكي التكنولوجيا المالية التي تؤدي إلى هجمات التكنولوجيا المالية في القانون رقم 27 لعام 2022 بشأن حماية البيانات الشخصية، وهي السجن لمدة أقصاها 6 سنوات وغرامة أقصاها 6 روية. 6,000,000,000.00 روية (سنة مليارات روية) والتزيبات المتعلقة بالتهديد بعقوبة مرتكبي هجمات التكنولوجيا المالية التي تُنفذ على المستهلكين والجمهور ينظمها القانون رقم 1 لعام 2024 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية، وهي السجن لمدة 6 سنوات وغرامة أقصاها 1,000,000,000.00 روية (مليار روية).

2 حماية المستهلك كما هو منصوص عليه في القانون الوضعي من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة قد تقي بمستوى الضروريات، بما في ذلك حفظ النفس/الكرامة (حماية حقوق الإنسان وكرامة الإنسان)، حيث تتضمن قوانين حماية المستهلك حقوق المستهلكين. جُفُط العَقْل (تطوير التفكير والبحث العلمي) يتعلق بمبدأ التشقيف تجاه المستهلك، من خلال الأنشطة التثقيفية التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية في تقلسم الفهم حول خصائص المنتجات أو الخدمات في القطاع المالي للمجتمع بشكل عام، وتعزيز فهم المستهلكين حول المنتجات أو الخدمات، والفوائد، والتكاليف، والمخاطر، والإجراءات وآليات حماية المستهلك، جُفُط

المال (تَنَمِيَةُ الْاِقْتِصَادِ وَتَوَزِيْعُ مُسْتَوَى الرِّفَاحِيَّةِ):

إِنَّ تَطَوُّرَ التَّكْنُوْلُوجِيَا الْمَالِيَّةِ (فِيْنَتِك) يُعَدُّ نَمُوًّا اِقْتِصَادِيًّا، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، فَإِنَّ الْفِيْنَتِك يُسَاهِمُ فِي تَطْوِيْرِ الْمَوْسَّسَاتِ الْمَالِيَّةِ، بِمَا يُؤَدِّي إِلَى تَعْزِيْزِ الْاِقْتِصَادِ الْوَطَنِيِّ. وَكَذَلِكَ تَنَمِيَةُ الْمَوَارِدِ الْبَشَرِيَّةِ تُعْتَبَرُ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ، فَإِنَّ وُجُودَ فُرْصَةِ الْاِخْتِيَارِ (الصَّنْدُوْقُ التَّجْرِيْبِي - يُعَدُّ تَنَمِيَةً لِلْمَوَارِدِ الْبَشَرِيَّةِ. وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ تَحْلِيْلَ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ لِفَعَالِيَّةِ قَانُوْنِ حِمَايَةِ الْمُسْتَهْلِكِ فِي مَجَالِ الْفِيْنَتِك، أَكْثَرُ مِنْ تَحْلِيْلِ خُطُوْرَةِ الْفِيْنَتِك نَفْسِهِ لَمْ يَتَحَقَّقْ تَحَقُّقًا كَامِلًا فِي ضَوْءِ مَبَادِي: حِفْظُ النَّفْسِ / الْعَرَضِ، وَحِفْظُ الْعَقْلِ، وَحِفْظُ الْمَالِ، مِنْ وَجْهَةِ نَظَرٍ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ